

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap pengelola keuangan negara wajib bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan serta wajib membuat laporan keuangan yang terintegrasi dan akuntabel. Seiring dengan berkembangnya waktu, Indonesia telah mengalami berbagai macam reformasi salah satunya dalam pelaporan keuangan pemerintah. Reformasi ini berawal dari munculnya beberapa undang-undang antara lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pada tahun 2015 terjadi reformasi dalam penyusunan laporan keuangan, penggunaan basis akrual secara penuh dalam lingkungan pemerintah Indonesia. Sebelumnya penyusunan laporan keuangan pemerintah masih menggunakan basis kas menuju akrual. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah mengharuskan penerapan basis akrual pada pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini ditujukan agar informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan lebih dapat menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya serta menjadi lebih komprehensif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap jenis laporan keuangan tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam memberikan informasi keuangan kepada setiap entitas di pemerintah daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. PSAP 02 mengatur persyaratan untuk penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapan informasi yang terkait. Salah satu unsur dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diganti pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi belanja diatur dalam PSAP 02 Paragraf 34 terdiri dari klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Salah satu jenis belanja adalah belanja operasi. Kemudian, PSAP 02 Paragraf 36 mendefinisikan belanja operasi sebagai pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah dan bantuan sosial.

Selanjutnya, pada PSAP 12 menjelaskan lebih rinci terkait Laporan Operasional. Menurut PSAP 12 Paragraf 37, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada dasarnya mengelompokkan berbagai jenis beban. Klasifikasi ekonomi pemerintah daerah meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu entitas akuntansi pemerintah daerah di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai salah satu entitas di bawah naungan pemerintah daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi wajib untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Agar terwujudnya akuntansi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan auditabel dalam memenuhi tugas dan fungsi satuan kerja, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan laporan keuangan memerlukan adanya penerapan akuntansi beban dan belanja operasional yang baik dan benar sesuai dengan SAP yang berlaku.

Beban dan belanja operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi pada tahun anggaran 2020 meliputi belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini perlu diperhatikan karena belanja operasi merupakan belanja yang menunjang aktivitas harian satuan kerja yang memerlukan anggaran paling

besar pada sebagian satuan kerja termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi. Hal tersebut membuat penulis berencana untuk meninjau penyajian laporan keuangan yang telah disusun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2020 khususnya Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran bagian beban dan belanja operasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan peninjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2020. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir “Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Beban dan Belanja Operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penganggaran terkait beban dan belanja operasional di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana praktik pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasional di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apakah pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasional di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku?

4. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasional di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. Mengetahui penganggaran terkait beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.
2. Mengetahui praktik akuntansi beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.
3. Meninjau kesesuaian antara praktik akuntansi beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengetahui berbagai kendala yang masih ada dalam rangka penerapan akuntansi atas belanja dan beban operasional di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan dibatasi sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah di jelaskan. Penulis berfokus mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi. Adapun untuk

data tinjauan dipilih laporan keuangan tahun anggaran 2020 karena data pada tahun tersebut merupakan data terbaru yang tersedia.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dapat memberi manfaat, baik secara akademis maupun praktis, antara lain:

#### 1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai akuntansi beban dan belanja operasional

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi penulis lain untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang serupa

##### b. Bagi objek yang bersangkutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai gambaran umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berisi uraian latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran mengenai objek penelitian yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi. Gambaran tersebut meliputi profil singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi. Penulis juga akan memaparkan mengenai teori-teori dan dasar hukum mengenai pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan pembahasan atas topik karya tulis ini, yaitu tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2020. Adapun hal yang ditinjau oleh penulis antara lain definisi beban dan belanja operasional, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapannya. Setelah itu penulis akan membandingkan hasil tinjauan praktik akuntansi beban dan belanja operasional dengan ketentuan umum yang berlaku.

## BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan membuat simpulan dari uraian bab-bab sebelumnya terkait tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional yang meliputi pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi.